



Pembahasan RAPBD

2023 Berlanju

NGABANG - Penjabat (Pj) Bupati Landak Samuel menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Landak terhadap Nota Keuangan dan Raperda tentang RAPBD Kabupaten Landak tahun anggaran 2023, di Ruang Rapat Gedung DPRD Landak, Senin (21/11). Dalam paripurna kala itu, Pj. Bupati menyebut bahwa pemerintah sudah memberikan jawaban atau tanggapan terhadap pandangan umum fraksi DPRD Landak.

Dalam pandangan umum itu, diakui Pj. Bupati, banyak hal yang disarankan oleh fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Landak, terutama dalam hal pendapatan. Fraksi-fraksi DPRD mendorong mereka agar dapat menggali penda-



MIPTAHUL KHAIR/PONTIANAK POST

PENYERAHAN DRAF: Pj. Bupati Landak Samuel menyerahkan teks jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Landak terhadap Nota Keuangan dan Raperda tentang RAPBD Kabupaten Landak, Senin (21/11).



patan secara optimal.

"Tentu kita terima kasih kepada fraksi yang telah memberikan masukan dan saran. Dan ini menjadi perhatian OPD terkait untuk meningkatkan potensi yang ada untuk direalisasikan sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa meningkat," ungkap Samuel.

Kemudian ia mengatakan, terkait dengan belanja yang harus dialokasikan untuk pembangunan skala prioritas kepada masyarakat, juga akan menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Landak. Nantinya, menurut dia, tentu akan dilakukan oleh OPD terkait sesuai dengan kewenangannya.

Ia berharap agar nantinya, pembahasan RAPBD 2023 bisa berjalan baik dan lancar. Tentulah, kata dia,

Badan Anggaran dan TAPD akan berkolaborasi bersinergi untuk membahas hal tersebut.

"Dengan dana yang ada kemudian dialokasikan untuk belanja sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dan tentu sekali lagi berpihak kepada kepentingan masyarakat dengan skala yang sangat prioritas," ungkap Samuel.

Di tempat yang sama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Landak Oktapius menjelaskan, secara garis besar pandangan umum fraksi-fraksi DPRD landak menyoroti soal pendapatan dan belanja. Dari sisi pendapatan, menurutnya, hal yang merupakan dasar pokok dan salah satu wujud tolok ukur dari kemandirian sebuah daerah. "Karena itu

memang kita pacu agar PAD kita itu bisa meningkat," ungkap Okta.

Sementara itu, dari sisi belanja, dari pandangan fraksi-fraksi, menurut dia, menekankan hal-hal yang sangat prioritas. Pembangunan yang sangat prioritas, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini.

"Setelah jawaban dari pemerintah, maka sesuai dengan jadwal yang sudah kita susun, maka kita akan melakukan rapat DPRD melalui Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahas rancangan APBD ini. Nanti ketika sudah disepakati, barulah ini menjadi yang namanya APBD," tutup Oktapius. *(mif)*